



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
: KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RINEL PONTO
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 279973

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **359.000.000**

1. Tanah Seluas 400 m2 di BOALEMO, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1950 m2/121 m2 di BOALEMO, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
3. Tanah Seluas 9972 m2 di BOALEMO, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
4. Tanah Seluas 10699 m2 di BOALEMO, HASIL SENDIRI Rp. 37.000.000
5. Tanah Seluas 8217 m2 di BOALEMO, HASIL SENDIRI Rp. 32.000.000
6. Tanah Seluas 4000 m2 di BOALEMO, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
7. Tanah Seluas 1400 m2 di BOALEMO, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **26.000.000**

1. MOTOR, Yamaha Yamaha 54P (MIO J) Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, Yamaha F1ZR Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000



3. MOTOR, YAMAHA F1 Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
4. LAINNYA, HONDA GX120 Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp.
1.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	45.400.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	17.967.861
F. HARTA LAINNYA	Rp.	21.774.212
Sub Total	Rp.	470.142.073
III. HUTANG	Rp.	246.767.717
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	223.374.356

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.